

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pangan dan Pertanian dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Selanjutnya dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, telah ditetapkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pangan dan Pertanian adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan, serta Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas dengan berpedoman kepada Renstra OPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- e. menyusun dan menyelenggarakan program penyuluhan pertanian untuk pengembangan pembangunan pertanian;
- f. melakukan penataan prasarana dan pembinaan produksi di bidang pertanian;
- g. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- h. melakukan pengawasan peredaran sarana pertanian berpedoman kepada petunjuk teknis yang ditetapkan;
- i. melakukan pengendalian dan menanggulangi hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- j. melakukan pengendalian dan menanggulangi bencana alam skala daerah;
- k. melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil panen di bidang pertanian;
- l. menyelenggarakan proses penerbitan izin usaha dan rekomendasi teknis di bidang pertanian;
- m. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;
- n. melaksanakan administrasi Dinas Pangan dan Pertanian;

- o. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik, sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur serta fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat secara periodik untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang pertanian;
- p. melaporkan kegiatan Dinas sesuai dengan realisasi yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, perikanan dan pelaksana penyuluhan serta ketaanan pangan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesmavet; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Peternakan;
- b. Seksi Sarana, Prasarana Peternakan; dan
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

5. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan dan Pelaksanaan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan
- b. Seksi Kelembagaan Tani; dan
- c. Seksi Perikanan.

6. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan panganekaragaman konsumsi pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ketersediaan dan keamanan pangan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program distribusi dan harga pangan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan dan Keamanan Pangan
- b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; dan
- c. Seksi Kewaspadaan dan penganekaragaman Konsumsi Pangan.

7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Puskeswan pada Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan

8. UPTD Balai Benih Ikan

UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pembibitan benih ikan, pengujian dan persiapan teknologi di lapangan, pemasaran benih ikan, penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi, pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta Pusat Pelatihan Pembenihan Ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembenihan benih ikan;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
- c. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan;
- d. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi;
- e. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat agrowisata; dan
- f. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

UPTD Balai Benih Ikan susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan

9. UPTD Rumah Potong Hewan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Puskesmas pada Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis, sarana dan prasarana Dinas Pangan dan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis.